



## JURNAL KELUARGA BERENCANA

e-ISSN : 2503-3379  
p-ISSN : 2527-3132



<http://ejurnal.bkkbn.go.id>

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA KEKERASAN PADA PEREMPUAN DI KOTA PEKANBARU

NL. Meilani<sup>1</sup> & Hesti Asriwandari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau  
Jalan HR. Soebrantas 1 Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru  
<sup>1</sup>[meilanimeilani09@gmail.com](mailto:meilanimeilani09@gmail.com), <sup>2</sup>[asriwandari@yahoo.com](mailto:asriwandari@yahoo.com)

Diterima 10 Juni 2019; diterima dalam bentuk revisi 25 Juli 2019; diterima 14 Juli 2019  
diterbitkan online 30 Juli 2019

### Abstrak

Artikel ini bertujuan mengukur dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan pada perempuan di Kota Pekanbaru. Data Susenas 2015 menjadi sumber data yang dianalisis dengan menggunakan software Stata 13. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis bivariat dan multivariat. Karakteristik latar belakang, aspek sosial ekonomi dan kependudukan menjadi variabel independen (X) dan kekerasan pada perempuan sebagai variabel dependen (Y). Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik latar belakang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap munculnya kekerasan pada perempuan di Kota Pekanbaru, terutama pada variabel umur dan status perkawinan. Pada aspek sosial ekonomi, hanya variabel pendidikan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap munculnya kekerasan pada perempuan di Kota Pekanbaru. Mobilitas sebagai salah satu derivasi aspek kependudukan ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap munculnya kekerasan pada perempuan di Kota Pekanbaru.

© 2019 Pusat Penelitian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

**Kata kunci:** Kekerasan, Perempuan, Kependudukan, Sosial ekonomi

## I. PENDAHULUAN

Dinamika kependudukan yang terjadi di Provinsi Riau berjalan dengan sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Dari segi kuantitas, jumlah penduduk Riau tergolong besar terutama jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera. Berdasarkan data dari Sensus

Penduduk (SP) 2010, jumlah penduduk Riau sebanyak 5.538.367 jiwa. Pertumbuhan penduduk Riau pada periode 2000 sampai dengan 2010 berada pada persentase 3,59 persen. Persentase ini tetap berada di atas angka capaian nasional. Capaian ini menjadi kabar yang tidak begitu menggembirakan sebab dengan capaian yang melebihi angka nasional, sama dengan menyumbang jumlah

penduduk yang terus menerus bertambah dari tahun ke tahun.

Secara teoretis, berbagai literatur sepakat bahwa pertumbuhan penduduk sangat mempengaruhi stabilitas pertumbuhan bidang lain. Birdsall, dkk (2001); Adioetomo (2009); Wongboonsin, dkk (2003) mengungkapkan temuan penelitian mereka bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan kemiskinan, dan sebaliknya kemiskinan menyebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Selain menasar pada aspek kemiskinan, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi perilaku ekonomi dan kebutuhan manusia.

Kriminalitas menjadi salahsatu dampak negatif yang ditimbulkan karena adanya pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data dalam Statistik Kriminal (BPS, 2016), pada rentang waktu tahun 2014 ke 2015, Provinsi Riau menjadi salahsatu provinsi yang menjadi perhatian pusat karena pada periode ini Riau mengalami kenaikan jumlah rumah tangga yang menjadi korban kejahatan (bergerak pada persentase 2,53 % menjadi 2,92%). Selain itu, masih pada periode yang sama, Provinsi Riau juga mengalami kenaikan dari segi jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan (dari 1,04 % menjadi 1,26%). Fenomena kejahatan di Provinsi Riau yang mengalami peningkatan ini berhasil terjaring dalam proses pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian di Provinsi Riau adalah kekerasan pada perempuan. Berdasarkan Laporan Tahunan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Tahun 2016, kota Pekanbaru menjadi wilayah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terbanyak se-

Provinsi Riau dengan jumlah kasus 78 kasus pada tahun 2015 dan menurun menjadi 75 kasus pada tahun 2016. Kabupaten Bengkalis menjadi daerah terbanyak kedua setelah Kota Pekanbaru, dengan jumlah kasus di tahun 2015 dan 2016 sebanyak 40 kasus. Dari paparan angka absolut jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diatas, jika dikonversikan dalam persentase, terdapat gap yang sangat besar antara Kota Pekanbaru dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Secara persentase, kasus kekerasan di terhadap perempuan dan anak di Kota Pekanbaru sebesar 46,64 %. Sementara kabupaten Bengkalis sebagai terbanyak kedua berada pada kisaran 12,19%. Data aktual ini tentunya menimbulkan pertanyaan tersendiri terkait dengan besarnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pekanbaru.

Kasus kekerasan pada perempuan menjadi suatu hal yang urgent untuk dihapuskan seiring dengan gencarnya gerakan sosial (social movement) di tingkat internasional maupun nasional dalam bentuk "Three Ends". Yaitu gerakan sosial yang mengkampanyekan komitmen dan upaya nyata untuk menghapuskan kekerasan pada perempuan dan anak (*End Violence Against Women and Children*), perdagangan manusia (*End Human Trafficking*), kesenjangan ekonomi (*End Barriers to Economic Justice*).

Selain dari faktor pendorong berupa gerakan Three Ends, penghapusan kekerasan pada perempuan khususnya di Kota Pekanbaru juga harus digesa sebab kota Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Jika persoalan kekerasan pada perempuan tidak digesa penyelesaiannya, jelas akan menimbulkan masalah- masalah sosial

kependudukan lainnya, misalnya meningkatnya angka kriminalitas, menurunnya kualitas anak-anak karena si ibu yang mengalami kekerasan. Lebih jauh lagi jika kasus kekerasan dibiarkan marak terjadi di kota Pekanbaru, secara tidak langsung justru akan menjadi sosialisasi negatif bagi dunia anak-anak karena mereka akan lekat dengan kasus-kasus kekerasan tersebut, sehingga upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan masyarakat Kota Pekanbaru yang Madani jelas akan terhambat. Artikel ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kasus kekerasan pada perempuan di Kota Pekanbaru dengan menggunakan data Susenas 2015.

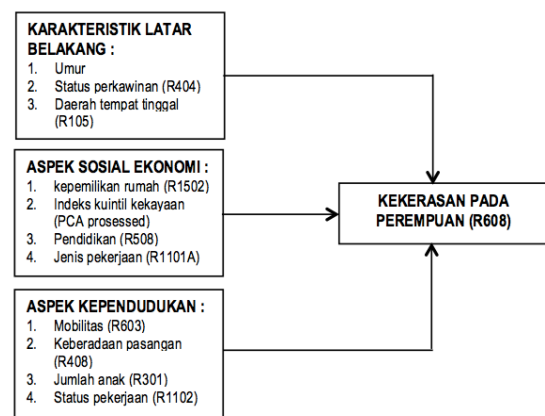
## II. METODE

Artikel ini merupakan analisis data sekunder yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015. Alasan pemanfaatan data Susenas ini sendiri karena data dan indikator dari Susenas telah dipergunakan secara luas dan dipandang sebagai salah satu bukti penting yang dapat berguna untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan pemerintah.

Susenas merupakan survei tahunan yang mengumpulkan data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang meliputi kondisi kesehatan, pendidikan, fertilitas, Keluarga Berencana, perumahan dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Unit analisis yang digunakan dalam Susenas adalah rumah tangga. Jenis kuesioner dalam Susenas ada dua, yaitu kuesioner Kor serta kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran. Dalam penelitian ini, kuesioner Kor menjadi

sumber instrumen utama yang digunakan. Adapun jumlah sampel total dalam Susenas 2015 adalah sebanyak 75.000 rumah tangga.

Data dalam Susenas 2015 kemudian dipilih dan dipilah berdasarkan variabel-variabel yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Gambar 1 menunjukkan kerangka analisis dan daftar pertanyaan dalam kuesioner Susenas yang dirujuk penulis. Software Stata 13 digunakan sebagai *software* utama untuk melakukan analisis bivariat dan multivariat guna mengukur kekuatan hubungan/pengaruh variabel sosial ekonomi, kependudukan, dan karakteristik individu terhadap kejadian kekerasan pada perempuan di Kota Pekanbaru.



**Gambar 1. Kerangka Analisis Data Sekunder**

Secara operasional, umur didefinisikan sebagai satuan waktu (dalam tahun) yang mengukur lama hidup responden mulai dari lahir sampai pada saat dirinya diwawancarai dalam Susenas 2015. Status perkawinan responden diklasifikasikan menjadi 4 yaitu (1) belum kawin; (2) kawin, yaitu mempunyai istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama

dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami-istri; (3) cerai hidup, yaitu berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap **cerai hidup**; dan (4) cerai mati, yaitu ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi. Sedangkan daerah tempat tinggal merupakan wilayah administratif dimana responden berdomisili, terdiri dari pilihan perkotaan atau pedesaan.

Pada aspek sosial ekonomi, kepemilikan rumah didefinisikan sebagai status kepemilikan yang membawa konsekuensi pada aspek kebebasan penggunaan sehari-hari atas rumah tersebut. Indeks kekayaan merupakan jumlah kepemilikan aset yang dimiliki oleh responden yang dilihat dari jenis atap, lamtai, dinding, sumber air, jenis toilet dan status kepemilikan rumah. Juga aset yang berupa alat elektronik dan kendaraan. Pendidikan merujuk pada jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh responden. Sedangkan jenis pekerjaan adalah jenis maupun sektor lapangan usaha yang ditekuni yang mendatangkan materi pada saat responden diwawancarai surveyor Susenas 2015.

Aspek yang ketiga terdiri dari mobilitas, keberadaan pasangan, jumlah anak, dan status pekerjaan. Mobilitas merujuk pada perpindahan responden dari daerah domisili ke tempat lain di luar dari kota/kabupaten tempat responden tersebut

berdomisili untuk tujuan apapun, misalnya refreshing, pendidikan, bekerja, dan sebagainya. Sedangkan keberadaan pasangan merupakan kondisi sehari-hari terkait dengan dimana pasangan responden bermukim, apakah dalam bangunan fisik yang sama dengan responden atau berada pada bangunan fisik yang berbeda dengan responden. Selanjutnya, jumlah anak merupakan jumlah anak yang masih hidup sampai dengan saat pencacahan. Termasuk juga adalah anak angkat dan anak sambung. Terakhir, status pekerjaan merupakan kondisi yang terkait dengan upaya dan usaha dari responden untuk memperoleh penghasilan baik.

Variabel kekerasan pada perempuan sebagai variabel dependen didefinisikan sebagai aalabsatu varian dari kejahatan. Seseorang dikatakan menjadi korban kejahatan bila dalam setahun terakhir ia atau harta bendanya mengalami/terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang dimaksud dalam Susenas adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP, sebatas yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta kekayaannya, misalnya pembunuhan, penganiayaan, penculikan atau perampasan kemerdekaan, pencurian dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, pembakaran, perusakan, penggelapan, penipuan, perkosaan, penghinaan, perzinaan, narkoba, perjudian, penjualan anak, dan pencemaran nama baik.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil olah data Susenas 2015 secara umum menunjukkan adanya 1,92% responden perempuan di Kota Pekanbaru yang pernah menjadi korban kejahatan.

Dalam bentuk apapun, kejahatan pada perempuan di segala usia (dewasa maupun anak-anak) merupakan tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis (verbal, seksual, dan lain sebagainya). Membicarakan persoalan kejahatan/kriminal, seluruh elemen nampaknya harus bersepakat bahwa kejahatan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun harus diminimalisasi sehingga mencapai kondisi *zero accident*. Oleh karena itu, angka 1,92 % tersebut tentu saja merupakan angka yang mengindikasikan bahwa tingkat kekerasan pada perempuan di Kota Pekanbaru masih tinggi. Karena kondisi idealnya adalah 0 %. Dalam rangka mewujudkan kondisi ideal tersebut (menurunkan sekaligus memberantas fenomena kekerasan pada perempuan), perlu diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya fenomena itu sendiri.

Tabel 1 menunjukkan analisis deskriptif dan multivariat pengaruh karakteristik latar belakang terhadap munculnya kekerasan pada perempuan di Kota Pekanbaru. Analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa kekerasan pada perempuan di Kota Pekanbaru paling banyak dialami oleh perempuan pada kelompok umur 45-49, yaitu sebesar 7,95%. Terbanyak kedua adalah perempuan pada kelompok umur 20-24 tahun. Kasus kekerasan pada kelompok umur anak-anak tidak terlalu menonjol di Kota Pekanbaru.

**Tabel 1.** Pengaruh Karakteristik Latar Belakang terhadap Munculnya Kekerasan pada Perempuan di Kota Pekanbaru

Karakteristik latar belakang	Kekerasan pada perempuan		Sig.
	Ya (%)	Tidak (%)	
<b>Kelompok Umur</b>			<b>0.015*</b>
11-14	1.06	98.94	
15-19	1.53	98.47	
20-24	4.78	95.22	
25-29	3.02	96.98	
30-34	2.95	97.05	
35-39	3.38	96.62	
40-44	3.78	96.22	
45-49	7.95	92.05	
<b>Status perkawinan</b>			<b>0.000**</b>
Belum kawin	1.32	98.68	
Kawin	4.2	95.80	
Cerai hidup	0	100	
Cerai mati	1.33	98.67	
<b>Daerah tempat tinggal</b>			<b>0.211</b>
Perkotaan	2.64	97.36	
Pedesaan	1.12	98.88	

Sumber : Data diolah, 2017

Dari hasil analisis data multivariat, ditemukan bahwa faktor umur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap munculnya kasus kekerasan pada perempuan di Kota Pekanbaru. Nilai pengaruhnya sebesar 0,015. Nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan dalam penelitian ini (0,05), sehingga dapat dirumuskan  $0,015 < 0,05$ . Oleh karena itu temuan bahwa faktor umur berpengaruh terhadap fenomena kekerasan pada perempuan dapat digeneralisasi untuk level kota Pekanbaru dengan persentase kepercayaan/keyakinan sebesar 95% (dan potensi kesalahannya sebesar 5%).

Masih dalam variabel karakteristik latar belakang, ditemukan bahwa status perkawinan berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya kekerasan pada perempuan di Kota Pekanbaru ( $0,000 < 0,05$ ). Sedangkan daerah tempat tinggal

tidak berpengaruh terhadap munculnya kekerasan pada perempuan di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya, faktor sosial ekonomi menjadi variabel kedua yang dianalisis dalam artikel ini. Hasil analisis dapat dilihat dalam Tabel 2. Secara deskriptif diperoleh temuan bahwa perempuan dengan status kepemilikan rumahnya menyewa/kontrak lebih banyak yang terkena kekerasan (yaitu sebanyak 3,11%). Sedangkan antara perempuan dengan status kepemilikan rumah adalah milik sendiri dan bebas sewa prosentase yang terpapar kekerasan jumlahnya relatif seimbang yaitu 2,49% dan 2,54%.

Kasus kekerasan terjadi hampir merata di semua tingkatan/level dalam indeks kuintil kekayaan perempuan. Mulai dari level terbawah, bawah, menengah, atas, dan teratas, persentase kejadiannya tidak ada selisih yang besar karena hanya bergerak pada kisaran persentase 2,02% sampai dengan 3,16%. Meskipun begitu, pada perempuan dengan indeks kekayaan bawah menjadi yang paling banyak terjadi kekerasan.

Temuan menarik pada tingkat pendidikan. Dimana secara deskriptif ditemukan bahwa perempuan dengan pendidikan S2 menjadi yang terbanyak yang pernah mengalami kekerasan, yaitu persentase 6,25%. Kemudian disusul perempuan dengan pendidikan D1 - D4/S1 sebanyak 5,25%. Jika diklasifikasikan, perempuan dengan pendidikan tinggi yang pernah menjadi korban kekerasan sebesar 11,70%; perempuan dengan pendidikan menengah sebesar 9,84%; dan perempuan yang menamatkan pendidikan dasar hanya sebesar 0,98%.

**Tabel 2.** Pengaruh Sosial Ekonomi terhadap Munculnya Kekerasan pada Perempuan di Kota Pekanbaru

Sosial ekonomi	Kekerasan pada perempuan		Sig.
	Ya (%)	Tidak (%)	
<b><i>Kepemilikan rumah</i></b>			<b><i>0.879</i></b>
Milik sendiri	2.49	97.51	
Kontrak/sewa	3.11	96.89	
Bebas sewa	2.54	97.46	
<b><i>Indeks kekayaan</i></b>			<b><i>0.607</i></b>
Terbawah	2.25	97.75	
Bawah	3.16	96.84	
Menengah	3.06	96.94	
Atas	2.14	97.86	
Teratas	2.02	97.98	
<b><i>Pendidikan</i></b>			<b><i>0.018*</i></b>
SD/MI	0.98	99.02	
SMP/Mts	4.03	95.97	
SMK/MA	2.54	97.46	
SMA/MA	3.27	96.73	
Diploma & S1	5.45	94.55	
S2	6.25	93.75	
<b><i>Jenis Pekerjaan</i></b>			<b><i>0.815</i></b>
Pertanian	3.67	17	
Industri pengolahan	4	96	
Konstruksi/bangunan	6.12	93.88	
Perdagangan, hotel	3.38	96.62	
Transportasi, pergudangan	4.23	95.77	
Keuangan & asuransi	8.33	91.67	
Jasa	3.67	96.33	
Lainnya	3.7	96.3	

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan jenis/bidang pekerjaannya, kasus terbanyak terjadi pada perempuan yang bekerja di bidang keuangan dan asuransi yaitu sebesar 8,33%, disusul kemudian pada bidang konstruksi/bangun sebesar 6,12%.

Dari analisis deskriptif diatas, dapat disimpulkan terkait dengan capaian signifikansinya. Variabel pendidikan sebagai salahsatu variabel dalam faktor sosial ekonomi diketahui memiliki pengaruh yang signifikan terhadap munculnya fenomena kekerasan pada

perempuan di kota Pekanbaru (0,018 < 0,05). Disisi lain, variabel kepemilikan rumah, indeks kuintil kekayaan, dan jenis pekerjaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fenomena kekerasan pada perempuan di Kota Pekanbaru dengan angka absolut hasil analisis statistik di STATA 13 masing-masing sebesar 0,879; 0,607; dan 0,815.

Pada aspek dampak kependudukan dalam kajian ini diturunkan ke dalam beberapa variabel yang terkait yang tercover dalam pertanyaan-pertanyaan di Kuesioener Kor Susenas 2015. Variabel yang akhirnya ditetapkan dalam dampak kependudukan merupakan hal-hal apa saja yang menjadi efek atau dampak dari aktivitas kependudukan. Misalnya, migrasi akan menyebabkan seorang individu melakukan proses perpindahan (mobilisasi) dari satu tempat ke tempat lain. Dari migrasi ini juga akan menyebabkan pasangan suami istri apakah tinggal pada rumah (bangunan fisik) yang sama atau tidak, karena seringkali salah satu diantara pasutri tersebut harus mobile dengan alasan tertentu (biasanya karena alasan ekonomi/pekerjaan, sehingga pasangan tersebut menempuh *long distance relationship*/LDR. Selanjutnya, fertilitas penduduk juga akan menyebabkan banyak atau sedikitnya jumlah anak yang dimiliki. Pada gilirannya, jumlah anak akan merepresentasikan tentang beban atau tanggungan (ekonomi) dari penduduk yang menuntut mereka untuk mengambil pilihan bekerja atau tidak bekerja.

Hasil analisis deskriptif (Tabel 3) menunjukkan bahwa kekerasan terjadi pada perempuan yang melakukan mobilisasi jumlahnya lebih banyak daripada perempuan yang tidak melakukan mobilisasi. Perempuan yang hidup dan

tinggal bersama dengan pasangan/suami mengalami kasus kekerasan yang lebih banyak (4,2%) daripada mereka yang hidup tidak dalam satu bangunan fisik dengan pasangannya.

**Tabel 3.** Pengaruh Aspek Kependudukan terhadap Munculnya Kekerasan pada Perempuan di Kota Pekanbaru

Aspek Kependudukan	Kekerasan pada perempuan		Sig.
	Ya (%)	Tidak (%)	
<b>Mobilitas</b>			<b>0.005**</b>
Ya	3.93	96.07	
Tidak	2.03	97.97	
<b>Pasangan tinggal dalam satu rumah</b>			<b>0.96</b>
Ya	4.2	95.8	
Tidak	4.00	96	
<b>Jumlah anak</b>			<b>0.235</b>
0-1	3.96	96.04	
2-3	2.28	97.72	
4-keatas	0	100	
<b>Status pekerjaan</b>			<b>0.435</b>
Bekerja	3.83	96.17	
Tidak bekerja	2.26	97.74	

Sumber : Data diolah, 2017

Perempuan dengan jumlah anak 0-1 orang paling banyak terkena kekerasan dibandingkan dengan perempuan dengan jumlah anak 2 orang atau lebih. Terakhir, perempuan bekerja lebih banyak mengalami kekerasan jika dibandingkan dengan yang tidak bekerja.

Hasil analisis data dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa mobilitas menjadi satu-satunya faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap munculnya fenomena kekerasan pada perempuan dan anak di kota Pekanbaru dengan angka absolut signifikannya sebesar 0,005. Sedangkan keberadaan pasangan (tinggal serumah atau tidak), jumlah anak, dan status pekerjaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap munculnya fenomena kekerasan pada perempuan dan anak di Kota

Pekanbaru.

Selanjutnya, dilakukan analisis inferensial yang menunjukkan seberapa tinggi pengaruh dari faktor-faktor yang telah terukur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap munculnya fenomena kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Pekanbaru. Analisis inferensial bertujuan untuk mengukur seberapa tinggi pengaruh dan/atau hubungan dari masing-masing indikator terhadap peluang/potensi terjadinya kekerasan.

**Tabel 4.** Estimasi Nilai Odds Ratio pada Aspek Karakteristik Latar Belakang

Karakteristik latar belakang	Odds ratio	SE	p> z	[95% Conf. Interval]	
<b>Kelompok Umur</b>					
11-14	0.707	0.617	-0.40	0.128	3.911
15-19	1.000				
20-24	2.476	1.450	1.55	0.785	7.807
25-29	0.974	0.718	-0.03	0.230	4.129
30-34	0.742	0.560	-0.39	0.169	3.256
35-39	0.831	0.620	-0.25	0.192	3.590
40-44	0.986	0.683	-0.14	0.201	3.994
45-49	2.036	1.482	0.98	0.489	8.479
<b>Status perkawinan</b>					
Belum kawin	1.000				
Kawin	2.948	1.332	2.39	1.215	7.151
Cerai hidup	1				
Cerai mati	5.526	6.577	1.44	0.536	56.957
<b>Daerah tempat tinggal</b>					
Perkotaan	0.255	0.259	-1.34	0.034	1.874
Pedesaan	0.062	0.072	-2.39	0.006	0.606

Sumber : Data diolah, 2017

Dari Tabel 4 kolom *Odds Ratio* (OR) menunjukkan bahwa perempuan pada kelompok umur 20-24 tahun memiliki peluang/potensi lebih besar (sebanyak 2,476 kali) jika dibandingkan dengan perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun. Kemudian perempuan pada kelompok umur 45-49 mempunyai potensi terkena kekerasan lebih besar (sebanyak 2,036 kali) jika dibandingkan dengan perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun. Hal ini bisa jadi terkait dengan pola

pergaulan dan sosialisasi dari perempuan pada kelompok umur 20-24 tahun. Pada rentang usia ini, seorang perempuan masih termasuk dalam kategori remaja akhir, usia produktif dan merupakan angkatan kerja. Sebagai contoh dari perempuan pada kelompok umur ini yang banyak ditemui di kota Pekanbaru adalah lulusan sarjana yang tengah intens mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan mobilitas mereka menjadi relatif tinggi sehingga mengondisikan mereka bertemu dengan banyak orang di banyak lokasi. Disinilah mungkin yang bisa membuka peluang terjadinya kekerasan.

Selanjutnya, pada status perkawinan menunjukkan bahwa perempuan dengan status “cerai mati” berpeluang terkena kekerasan lebih besar (sebanyak 5,526 kali) jika dibandingkan dengan yang bersatus cerai hidup. Sedangkan perempuan dengan status “kawin” berpeluang sekitar 2,948 kali lebih besar dibandingkan dengan yang berstatus cerai hidup. Temuan ini nampaknya dapat dikaitkan dengan unsur sosiologis dan psikologis. Perempuan dengan status cerai hidup secara sadar dapat dikatakan telah membangun semacam “*self-defense*” untuk dirinya sendiri sebelum akhirnya dia memutuskan untuk bercerai. Artinya ketika dia sudah resmi bercerai dari suaminya, si perempuan itu telah memiliki kesiapan baik mental maupun non-mental yang sengaja dia bangun sebelum bercerai. Kesiapan ini pada gilirannya menjadi modal bagi dirinya untuk menghadapi banyak cobaan dan tantangan pasca perceraian.

Berbeda dengan perempuan dengan status cerai mati. Kejadian kematian menjadi suatu hal yang tidak dapat diprediksi (*unpredictable*). Dalam konstruksi sosial, perempuan berada pada



posisi subordinat. Maka wajar jika dalam masyarakat berkembang *stereotype* bahwa istri bergantung kepada suami, bukan suami yang bergantung kepada istri. Ketika kemudian mereka dipisahkan oleh kematian, tentu saja si perempuan akan mengalami keterkejutan secara psikis. Fatal dampaknya ketika sang istri memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap suami yang telah meninggal tersebut. Karena dirinya tidak akan memiliki kesiapan yang mumpuni untuk menghadapi tantangan dan tuntutan hidup pasca ditinggalkan oleh sang suami. Kondisi ini yang bisa jadi menguatkan secara kualitatif mengapa perempuan dengan status cerai mati jauh lebih rentan terkena kekerasan jika dibandingkan dengan perempuan dengan status cerai hidup.

**Tabel 5.** Estimasi Nilai Odds Ratio pada Aspek Sosial Ekonomi

Aspek Sosial Ekonomi	Odds ratio	SE	p> z	[95% Conf. Interval]	
<b>Kepemilikan rumah</b>					
Milik sendiri	1.00				
Kontrak/sewa	0.934	0.472	0.894	0.347	2.517
Bebas sewa	0.586	0.362	0.388	0.174	1.969
<b>Indeks kekayaan</b>					
Terbawah	1.000				
Bawah	1.223	0.550	0.45	0.506	2.955
Menengah	1.302	0.723	0.48	0.438	3.870
Atas	1.147	0.565	0.28	0.436	3.014
Teratas	1.061	0.528	0.12	0.399	2.818
<b>Pendidikan</b>					
SD/MI	1.000				
SMP/Mts	4.020	2.670	2.09	1.093	14.777
SMK/MA	1.406	1.164	0.41	0.277	7.122
SMA/MA	2.685	1.745	0.41	0.277	7.122
Diploma & S1	4.288	2.904	2.15	1.137	16.170
S2	6.605	6.408	1.95	0.986	44.233
<b>Jenis pekerjaan</b>					
Pertanian	1.325	1.672	0.22	0.111	15.718
Industri pengolahan	1.343	1.552	0.26	0.139	12.932
Konstruksi/bangunan	1.866	2.082	0.56	0.209	16.616
Perdagangan, hotel	1.026	1.095	0.02	0.126	8.308
Transportasi, perdagangan	1.169	1.389	0.13	0.114	11.997
Kuangan &	1.996	2.405	0.57	0.188	21.175

asuransi					
Jasa	0.969	1.035	-0.03	0.119	7.865
Lainnya	0.012	0.015	-3.62	0.001	0.135

Sumber : Data diolah, 2017

Kasus kekerasan pada perempuan seringkali memang dikorelasikan dengan kemiskinan. Kemiskinan identik dengan tingkat pendidikan yang rendah. Sampai disini, asumsi umum (*common sense*) selama ini menyatakan bahwa perempuan dengan pendidikan rendah akan lebih mudah terkena kekerasan. Namun hasil olah data dalam kajian ini menunjukkan temuan yang berbeda. Perempuan dengan pendidikan S2 teridentifikasi memiliki peluang lebih besar daripada perempuan dengan pendidikan SD/MI dengan angka *Odds Ratio* sebesar 6,605 kali. Masih pada jenjang pendidikan tinggi, perempuan dengan pendidikan Diploma dan S1 juga lebih rentan terhadap fenomena kekerasan jika dibandingkan dengan perempuan dengan pendidikan SD/MI. Temuan ini mengindikasikan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, justru membuatnya makin rentan terhadap kekerasan. Hal ini bisa jadi terkait dengan kepemilikan *economy capital* oleh perempuan dengan pendidikan tinggi jauh lebih besar dibanding dengan perempuan dengan pendidikan rendah, sehingga membuka peluang terjadinya kekerasan, pencurian/perampokan ataupun kekerasan dengan motif ekonomi lainnya, misalnya. Dari sisi indeks kekayaan, perempuan pada kelompok ekonomi menengah lebih rentan terkena kekerasan dibandingkan dengan perempuan pada level terbawah. Temuan dalam variabel pendidikan dan indeks kuintil kekayaan ini tentu saja menjadi temuan yang relatif berbeda dengan hasil/temuan pada kajian-kajian terdahulu. Hal inilah yang kemudian menuntut reaksi sekaligus intervensi yang sifatnya

*affirmative* di Kota Pekanbaru.

**Tabel 6.** Estimasi Nilai Odds Ratio pada Aspek Kependudukan

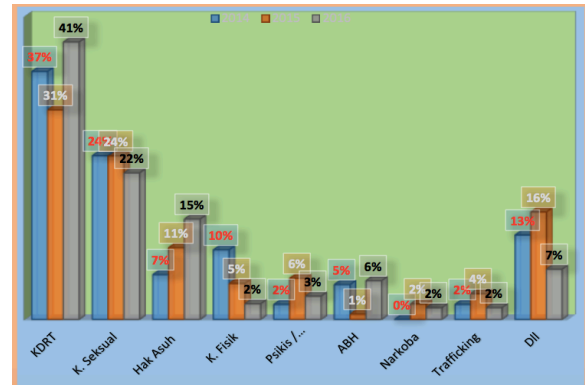
Aspek Kependudukan	Odds ratio	SE	p> z	[95% Conf. Interval]
<b>Mobilitas</b>				
Ya	0.908	0.169	0.606	0.629 1.309
Tidak				
<b>Pasangan tinggal di rumah yang sama</b>				
Ya	1	(omitted)		
Tidak				
<b>Jumlah anak</b>				
0-1	1.000			
2-3	0.727	0.525	0.659	0.176 2.993
4- keatas	1			
<b>Status pekerjaan</b>				
Bekerja	0.063			
Tidak bekerja	0.063	0.053	0.001	0.012 0.333

Sumber : Data diolah, 2017

Analisis multivariat untuk aspek yang terakhir yaitu aspek kependudukan menunjukkan bahwa perempuan yang melakukan mobilitas (berpergian) memiliki potensi terkena kekerasan lebih besar (0,908 kali) daripada yang tidak melakukan mobilitas (Tabel 6). Temuan ini bukan lantas berimplikasi bahwa perempuan harus dibatasi ruang geraknya. Akan tetapi temuan ini mengindikasikan masih lemahnya sistem keamanan lingkungan di Kota Pekanbaru. Artinya bahwa hak atas keamanan dan kenyamanan lingkungan sebagai salahsatu hak dasar, masih menjadi pekerjaan rumah bagi pihak-pihak yang berwenang di Kota Pekanbaru.

Dari hasil olah data kuantitatif diatas, nampaknya linier dengan hasil penelusuran via media massa (*online*) yang menunjukkan bahwa kasus aktual kekerasan pada perempuan di Kota Pekanbaru didominasi sebgaiian besar kasus kekerasan perempuan yang dilaporkan adalah kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penelusuran singkat dari media ini nyatanya sejalan dengan data yang diungkapkan oleh P2TP2A Provinsi Riau tentang jumlah dan jenis kasus kekerasan yang selama ini mereka tangani (Gambar 2).



**Gambar 2.**

Persentase kasus Kekerasan pada Perempuan yang Ditangani P2TP2A Provinsi Riau (Tahun 2014-2016)

Sampai dengan saat ini, P2TP2A Provinsi Riau menjadi garda terdepan dalam upaya penghapusan kekerasan pada perempuan di Kota Pekanbaru pada khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya. Kajian ini mengidentifikasi langkah dan upaya yang telah dilakukan oleh P2TP2A Provinsi Riau dalam rangka menghapus kekerasan pada perempuan, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Pencegahan

Pada tingkat pencegahan, P2TP2A melakukan kampanye serta sosialisasi melalui media yang ada. Baik media masyarakat maupun media pemberitaan. Kegiatan tersebut antara lain :

- Pusat Informasi. P2TP2A akan mengoptimalkan fungsi awalnya adalah sebagai sumber informasi termasuk informasi tentang lowongan kerja, informasi pelatihan untuk perempuan dll,

- sehingga diharapkan dapat membuat perempuan mandiri.
- b. *Day Care*, Tim mengunjungi tempat-tempat yang sudah dipetakan sebagai potensi terjadi kekerasan. Misalnya di Pasar, Terminal, dll.
  - c. Sosialisasi, melalui media yang ada dan melibatkan seluruh unsur yang ada dalam masyarakat antara lain, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dll melalui program PATBM.
  - d. Kampanye Anti Kekerasan, melalui berbagai media, antara lain pada kegiatan Car Free Day, serta pada saat moment tertentu yang juga melibatkan beberapa unsur yang ada, baik pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat serta komunitas-komunitas yang ada.
2. Penanganan
- Dalam Penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Riau, P2TP2A mencoba meningkatkan kapasitasnya dengan melatih berbagai pihak yang berkaitan dengan Penanganan, antara lain :
- a. Pelatihan *capacity building* pada petugas kesehatan ( pada bidan, Puskesmas dan Rumah Sakit).
  - b. Pelatihan *capacity building* pada penegak hukum ( Kepolisian dari Polres hingga Polsek yang banyak memiliki kasus tersebut, serta Jaksa).
  - c. Pelatihan bagi relawan P2TP2A baik tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten serta Satgas yang ada hingga tingkat desa.
  - d. Penyediaan Ruang khusus sesuai dengan standar pelayanan minimum di P2TP2A Provinsi Riau.
  - e. Melakukan intervensi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penanganan korban kekerasan agar sesuai dengan SPM.
3. Pemberdayaan
- Bidang pemberdayaan akan dilakukan pemberdayaan pada para korban, baik pemberdayaan secara ekonomi maupun secara mental hingga mereka bisa mandiri dan tidak akan menjadi korban lagi justru diharapkan akan menjadi tokoh yang akan menentang kekerasan itu sendiri. Kegiatan tersebut antara lain :
- a. Pelatihan *Life Skill* sesuai dengan minatnya dan akan dirujuk pada instansi atau lembaga terkait jika di P2TP2A tidak tersedia.
  - b. Pendampingan intervensi Ekonomi oleh Pekerja Sosial P2TP2A hingga bisa mandiri dengan bekerjasama dengan Lembaga Rehabilitasi “Tengku Yuk”.
  - c. Pendampingan Psiko-sosial oleh relawan Pekerja sosial sehingga korban mampu bangkit dan bisa berhubungan dengan masyarakat sekitarnya.

#### IV. PENUTUP

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa fenomena kekerasan pada perempuan di Kota Pekanbaru paling banyak dialami oleh perempuan (a) pada kelompok umur 45-49, yaitu sebesar 7,95% dan umur 20-24 tahun; (b) berstatus kawin; (c) perempuan bekerja; (d) berpendidikan S2; (e) indeks kekayaan pada level menengah; (f) bidang pekerjaan keuangan dan asuransi serta bangunan dan

konstruksi; (g) jumlah anak 0-1 orang dan hidup/tinggal pada bangunan fisik yang sama dengan pasangan.

Lebih lanjut, faktor karakteristik latar belakang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap munculnya kekerasan pada perempuan di Kota Pekanbaru, terutama pada variabel **umur** dan **status perkawinan**. Dari 4 (empat) variabel dalam faktor sosial ekonomi, hanya variabel **pendidikan** yang memiliki pengaruh signifikan terhadap munculnya kekerasan pada perempuan di Kota Pekanbaru. **Mobilitas** sebagai salahsatu manifestasi dari dampak kependudukan ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap munculnya kekerasan pada perempuan di Kota Pekanbaru.

Beberapa saran rekomendasi yang diberikan dari analisis data sekunder ini adalah,

1. Perlu adanya advokasi kepada pihak Kepolisian agar lebih meningkatkan sistem keamanan (jalan raya, *public space*, dan lainnya). Selain itu juga perlu digesa serta diaktifkan kembali peran dari Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
2. Inisiasi *hidden curriculum* pada kurikulum pendidikan (dasar sampai dengan pendidikan tinggi) tentang pentingnya *self-defense* bagi siswi dan mahasiswa.
3. Optimalisasi program-program pemerintah yang SUDAH berbasis pemberdayaan perempuan dan anak.
  - a. BKKBN dengan program BKR, Genre, PIK-R, serta UPPKS (kelompok sarasanya lebih banyak perempuan dan remaja perempuan).
  - b. Kementerian Sosial dengan program Keluarga Harapan (kelompok sasaran keluarga

(janda) miskin dengan banyak anak).

- c. Pemprov Riau (c.q. Dinas Perumahan dan Pemukiman Prov Riau) dengan Program Rumah Layak Huni/RLH (kelompok prioritas adlah janda tua dan laki-laki tua umur diatas 60 tahun yang tidak bekerja)
4. Menjadi urgent dan penting untuk dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Riau agar memberikan uluran tangan kepada P2TP2A Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru dalam rangka menghapuskan segala bentuk kekerasan pada perempuan di Kota Pekanbaru, karena selama ini masih minim ditemui adanya kerjasama dan koordinasi yang konkret diantara kedua instansi ini.

Artikel ini memiliki keterbatasan pada aspek sumber data—data sekunder dan teknik analisis yang digunakan—analisis kuantitatif murni. Oleh karena itu, untuk komprehensivitas dan kedalaman dalam memahami fenomena kekerasan pada perempuan di Kota Pekanbaru, perlu dilakukan kajian primer sebagai *follow up* dari temuan dalam kajian sekunder ini, khususnya dengan pendekatan kualitatif.

## REFERENSI

- Abel. Kathryn, et al. 1996. Planning Community Mental Health Services for Women, Routledge, London.
- Adioetomo, Sri Moertiningsih. 2005. Bonus Demografi Menjelaskan Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi. Pidato pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Ekonomi pad Fakultas Ekonomi Universitas

- Indonesia.
- Afandi, Dedi dkk. 2012. Karakteristik Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Indonesian Med Assoc*, Volum: 62, Nomor: 11, November 2012. Artikel Penelitian. <http://indonesia.digitaljournals.org/index.php/idnmed/article/download/1263/1239>. Diakses tanggal 20 Agustus 2017.
- Apriwal Gusti, Nelwitis, dan Nilma Suryani, Kriminologi, <http://scribd.com> Diakses pada tanggal 01 Oktober 2017.
- Asep Sopari, Gender dan Kependudukan serta Implikasinya dalam Pembangunan di Indonesia, <https://nad.bkkbn.go.id/unduh/program/47/>, diakses pada tanggal 30 September 2017.
- Birdsall, Nancy, et.al. 2001. *Population Matters : demographic Change, Economic Growth and Poverty in Developing World*. New York : Oxford University Press.
- BKKBN. Dampak Kependudukan Terhadap Keamanan Manusia dan Kriminalitas. 2011. Jakarta : Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN Pusat.
- BPS. Statistik Kriminal Tahun 2016. Badan Pusat Statistik (BPS). Jakarta (ISSN : 2089.5291)
- Brannen, Julia. 2005. *Memadu Metode Penelitian; Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Pelajar Offset : Yogyakarta.
- Clement A. Tisdell. 1998. *Population, Economic Change, and Environmental Security dalam buku Population and Global Security*, disunting oleh Nicholas Polunin. Cambridge, United of Kingdom: Cambridge University Press.
- Elmira N. Sumintapradja. 2014. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Psikologi. <http://repository.unpad.ac.id/18659/1/Kekerasan-Terhadap-Perempuan.pdf>. Diakses tanggal 25 Agustus 2017.
- Erich Fromm. 2008. *Akar Kekerasan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gelles, Richard J. 2004. *Child Abuse*. Dalam *Encyclopedia Article from Encarta*.
- Giddens. 1995. *The Constitution of Society: The Outline of The Theory of Structuration*, Policy Press Cambridge.
- Harnoko, B. Rudi. 2010. Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Muwazah Vol. No 1*, juli 2010.
- Heise, L.L. 1998. *Violence Against Women : An Integrated, Ecological Framework*, Sage Publications Inc.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak. Nuansa Cendekia : Bandung. Kanti Bajpai, 2000. Human Security : Concept and Measurement*. Kroc Institute Occasional Paper. Komariah Emong Sapardjaja dan Lies Sulistiani. 2014. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. <http://repository.unpad.ac.id/18659/1/Kekerasan-Terhadap-Perempuan.pdf>. Diakses tanggal 25 Agustus 2017.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Tahun 2016
- M.J. Kasiyanto. 1985. *Masalah Kependudukan dan Pembangunan dalam buku Ilmu Kependudukan*:

- Suatu Kumpulan Bacaan, cet. 2, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan dan Penerbit Erlangga.
- Mason, Andrew (ed). 2001. Population Change and Economic Development in East Asia : Challenge Met Opportunities Seized. Stanford, California : Stanford University Press.
- Mulkan dkk, 2002. Membongkar Praktek Kekerasan, PSIF Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ochberg, Frank M. 1988. Post-Traumatic Therapy and Victims of Violence, Brunner/Mazel, Publishers, New York.
- Paludi, Michele A. 1998. The Psychology of Women. Prentice-Hall, New Jersey.
- Paul W. Tappan, "Who is the Criminal?" dalam The Sociology of Crime and Delinquency, (New York: John Wiley & Sons, Inc),.
- Pradipta, Khinanty Gebi 2013. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Istri; Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6354/skripsi%20lengkap-hmp-khinanty%20gebi%20pradipta.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2017.
- Ross, John. 2004. Understanding the Demographic Deviden. The Policy Project, Future Group, Washington DC.
- Sherr, Lorraine and St Lawrence. 2000. Women, Health and The Mind. John Wiley & Sons. New York.
- Suharto, Edi. 1997. Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial. Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial : Bandung.
- Susiana, Sali. 2012. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Ruang Publik. Jurnal info singkat kesejahteraan sosial Vol. IV, No.04/II/P3DI/Februari/2012.
- Suwarno dan Syah, Pairul. 2013. Buku Ajar Sosiologi Kriminalitas. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Suyanto, Bagong. 2013. Masalah Sosial Anak. Penerbit Kencana Prenada Media Group : Jakarta
- UNDP. 1995. Human Development Report, World Summit on Social Development in Copenhagen.
- \_\_\_\_\_. 2009. Human Security Today and Tomorrow. Bangkok : UNDP Thailand.
- Windhu 1992. Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Galtung. Kanisius Yogyakarta.
- Kehidupan Keluarga*. Jakarta: Puslitbang KB dan KS BKKBN
- Kompas. 2013. Pengetahuan Kesehatan Remaja Sangat Rendah. *Kompas*. 3 April 2013. Diakses dari <http://lifestyle.kompas.com/read/2013/04/03/09412787/> Pengetahuan. Kesehatan. Reproduksi. Remaja. Sangat. Rendah
- Sarwono, S.W. 2010). *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada
- Socolov, D.G, Magdalena Iorga, Alexandru Carauleanu, et.all. 2017. *Research Article Pregnancy during Adolescence and Associated Risks: An 8-Year Hospital-Based Cohort Study (2007–2014) in Romania, the Country with the Highest Rate of Teenage*

*Pregnancy in Europe. Publishe d*  
*Januari 2017* Hindawi Publishing  
Corporation BioMed Research  
International Volume 2017, Article ID  
9205016,8 pages [http://dx.doi.org/  
10.1155 /2017/9205016](http://dx.doi.org/10.1155/2017/9205016)

